

**PERAN UNITED NATIONS HUMAN RIGHTS COUNCIL (UNHRC) DALAM
PENYELESAIAN KASUS PELECEHAN SEKSUAL DI REPUBLIK
AFRIKA TENGAH TAHUN 2013-2016**

**Oleh:
Rozalia¹**

(rozalia1307@gmail.com)

Pembimbing : Indra Pahlawan, S.IP M.Si

**Bibliografi : 4 Jurnal, 4 Buku, 8 Dokumen dan
Laporan Resmi, 5 Internet dan 8 Media Online**

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional – Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Kampus Bina Widya JL HR. Subrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28294 Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

This study illustrates the Role of the United Nations Human Rights Council in the settlement of sexual harassment cases in Central African Republic in 2013-2016. The unstable state security of the coup that took place in 2013 has put the UN Peacekeeping Force into the country to stabilize security conditions and protect civilians. In carrying out the mission, the UN Peacekeeping Force conducted sexual harassment against civilians, women and children victims. The focus of the research is sexual harassment conducted by UN peacekeepers.

This research theoretically has built with pluralism perspectives on International Relations and supported by the theory of International Organization and Role theory, and also the concept of human security. Formulation of all the arguments, facts and theoretical framework in this research was guided by qualitative descriptive explanation methods. Scope of this research is The Role of United Nations Human Rights Council (UNHRC) in The Settlement of Sexual Harassment Cases in Central African Republic in 2013-2016.

This research also proves that UNHRC is considered quite good in carrying out its role by forming an independent panel and investigation team to solve cases Sexual harassment occurring in the Central African Republic. To resolve this issue again in the future, the UN Security Council and the UN General Assembly passed resolution in 2016, namely UN Security Council resolution 2272 and General Assembly resolution 70/286.

Keywords: UNHRC, UN Multidimensional Peacekeeping Force, Human Security, Resolution of Security Council 2272, General Assembly Resolution 70/286.

¹ Mahasiswa Jurusan Ilmu Hubungan Internasional angkatan 2013

I. Pendahuluan

Penelitian ini akan membahas dan menekankan pada Peranan dari United Nations Human Rights Council (UNHRC) dalam menangani dan menyelesaikan kasus pelecehan seksual di Republik Afrika Tengah tahun 2013 - 2016. Negara ini terlibat dalam kudeta sejak tahun 2013 yang lalu pada saat kelompok pemberontak Seleka berusaha menggulingkan pemerintah. Terlepas dari kudeta yang terjadi di negara ini banyak sekali kasus-kasus yang tidak manusiawi terjadi dan salah satunya adalah pelecehan seksual. Pelecehan seksual ini dilakukan oleh pasukan penjaga perdamaian PBB dan korban dari pelecehan seksual ini adalah warga sipil yaitu perempuan dan anak-anak di bawah umur.

Kasus pelecehan seksual ini terjadi pada saat negara sedang dihadapi kudeta-kudeta yang membahayakan kehidupan warga sipil dinegara ini. Kasus pelecehan ini dilakukan oleh pasukan penjaga perdamaian yang sedang menjalankan misi di Republik Afrika Tengah.

Pasukan penjaga perdamaian masuk kenegara ini sebagai pasukan yang bertugas dalam menjaga stabilitas negara dan melindungi warga sipil yang berada ditengah konflik bersenjata. Pada awalnya, negara ini telah terlibat kudeta sejak awal kemerdekaannya. Sejak merdeka dari Perancis tahun 1960, negara ini telah mengalami 5 kali kudeta yaitu di tahun 1965, 1979, 1981, 2003, dan 2013 yang menyebabkan Republik Afrika Tengah tidak pernah lepas dari perang saudara, kekerasan, dan pelanggaran HAM.²

² Eberhard, M.R, "Crisis in the Central African Republic", International Condition for the Responsibility to Protect: daring, diakses di <http://www.responsibilitytoprotect.org/index.php/crisis/crisis-in-the-central-african-republic#> pada 15 oktober 2016 pukul 16.10

Konflik yang terjadi di Republik Afrika Tengah saat ini, mengharuskan PBB menurunkan pasukan penjaga perdamaian multidimensional PBB untuk menjaga dan mengawasi wilayah konflik di Republik Afrika Tengah. Beberapa tahun belakangan PBB mendapat laporan bahwa pasukan penjaga perdamaian multidimensional PBB di Republik Afrika Tengah telah melakukan pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak-anak di wilayah konflik tersebut.

Sepanjang tahun 2015 terdapat 99 tuduhan eksploitasi dan pelecehan seksual yang diajukan terhadap staf di berbagai lembaga PBB, sedangkan tahun 2014 terdapat 80 kasus yang sama.³ Kasus pelecehan seksual yang dilaporkan kebanyakan berasal dari Republik Afrika Tengah dan pelaku kejahatan adalah pasukan penjaga perdamaian yang berada dibawah naungan PBB itu sendiri.

Pelecehan seksual merupakan suatu tindakan perenggutan suatu hak dari seseorang secara paksa. Hak-hak setiap individu baik itu perempuan dan anak anak harus tetap dijunjung tinggi karna hak-hak tersebut adalah hak setiap orang. PBB telah melakukan penyelidikan atas sejumlah laporan terbaru kasus pelecehan seksual yang dilakukan personil pasukan perdamaian di Republik Afrika Tengah.⁴ Setiap laporan yang masuk akan diselidiki lebih dalam oleh *United Nations Human Rights Council (UNHRC)* sebagai organisasi yang bertugas melindungi dan menjaga hak asasi manusia.

Tidak seorang pun boleh diganggu urusan pribadinya, keluarganya, rumah

³ Website resmi:

<http://m.cnnindonesia.com/internasional/20160304115457-134-115297/hampir-100-tuduhan-pelecehan-seks-terhadap-staf-pbb-pada-2015/>, diakses pada 14 oktober 2016 pukul. 23.10 WIB

⁴ Website resmi: <http://liputanislam.com/berita/pbb-selidiki-kasus-baru-pelecehan-seks-pasukan-perdamaian-di-afrika-tengah/> diakses pada 15 oktober 2016 pukul 17.51 WIB

tanggungnya atau hubungan surat menyuratnya dengan sewenang-wenang; tidak diperkenankan melakukan pelanggaran atas kehormatan dan nama baiknya, setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum terhadap gangguan atau pelanggaran seperti ini (*Pasal 12 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia*).⁵ Pasal ini menegaskan bahwa setiap orang berhak atas hak-hak dasar dan setiap orang tidak diperbolehkan memaksakan kehendak mereka terhadap orang lain jika orang tersebut tidak memberikan izin.

Republik Afrika Tengah yang tengah dilanda konflik antara kelompok pemberontak dengan Pemerintah, PBB mengutus pasukan penjaga perdamaian di wilayah konflik tersebut. Pasukan yang seharusnya menjaga keamanan dan stabilitas di kawasan tersebut dilaporkan telah melakukan tindakan yang melanggar hak asasi manusia, pasukan penjaga perdamaian tersebut melakukan pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak-anak yang masih di bawah umur. Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut: Bagaimana Peran *United Nations Human Rights Council (UNHRC)* Dalam Penyelesaian Kasus Pelecehan Seksual di Republik Afrika Tengah Tahun 2013 - 2016?

Kerangka Teori

Dalam sebuah penelitian, kerangka dasar teori merupakan salah satu hal yang sangat diperlukan. Karena, dasar teori ini yang akan digunakan sebagai dasar untuk penulisan penelitian.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tingkat analisa Sistem Internasional. Dalam Sistem Internasional fokus kajiannya adalah sistem internasional

itu sendiri. Asumsinya adalah perubahan atau dinamika di dalam sistem internasional menentukan perilaku aktor-aktor HI. Tingkat analisa dalam penelitian ini difokuskan bagi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), terkhususkan lagi oleh Dewan Hak Asasi Manusia PBB atau *United Nations Human Rights Council (UNHRC)*.

Selanjutnya, dalam penelitian ini penulis menggunakan perspektif Pluralisme. Pluralisme merupakan salah satu perspektif yang berkembang pesat. Kaum pluralisme memandang hubungan internasional tidak hanya terbatas pada hubungan antar negara saja tapi juga merupakan hubungan antara individu dan kelompok kepentingan dimana negara tidak selalu sebagai aktor utama dan aktor tunggal.

Dalam pandangan atau perspektif pluralisme isu-isu yang berkaitan dengan hubungan internasional mempunyai dimensi kajian yang sangat luas dan beragam. Kaum pluralism lebih memandang isu hubungan internasional pada sisi yang lebih luas dan cenderung berkonsentrasi pada isu-isu yang berkaitan langsung dengan masyarakat.⁶ Pelaku-pelaku hubungan internasional non-negara mampu membangun sistem internasional baru (globalisasi).⁷

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan konsep untuk memudahkan dalam menganalisa penelitian. Konsep yang dipakai oleh penulis adalah konsep *Human Security*. Dalam dunia internasional yang bersifat anarki, isu keamanan internasional tidak lagi hanya berbicara tentang keamanan negara, melainkan juga berkaitan dengan keamanan “manusia” (Barry Buzan dkk

⁵ Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Tahun 1948

⁶ Juwono Sudarsono, “*Perkembangann Studi Hubungan Internasional dan Tantang Masa Depan*”, Pustaka Jaya, Jakarta, 1996, hlm. 29

⁷ M. Saeri Jurnal Transnasional, “*Teori hubungan internasional sebuah pendekatan paradigmatic*”, vol.3, no.2, februari 2012

dalam Budi, 2014).⁸ Tujuan dari *Human Security* adalah menjamin kelangsungan hidup dan martabat serta harga diri umat manusia.

Dari penjelasan konsep kemanan manusia diatas, maka permasalahan pelecehan seksual terhadap perempuan didunia khususnya perempuan dan anak-anak diwilayah konflik Republik Afrika Tengah termasuk kedalam konsep keamanan manusia, karena terganggunya hak dan kehormatan seseorang.

Selanjutnya, teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Organisasi Internasional dan teori Peran.

A. Teori Organisasi Internasional adalah suatu badan yang terbentuk dengan beranggotakan negara satu dengan negara lain yang tujuan pendiriannya untuk mencapai tujuan bersama sesuai isi perjanjian.(Clive Archer, 1983:35).⁹ Menurut Daniel S. Cheever & H. Field Haviland Jr, yang dikutip oleh Drs. T. May Rudy, SH., MIR., M.Sc dalam karangan bukunya yang berjudul Administrasi dan Organisasi Internasional, mengenai organisasi internasional secara sederhana dapat didefinisikan sebagai:¹⁰

“Pengaturan bentuk kerjasama internasional yang melembaga antara negara-negara, pada umumnya berlandaskan suatu persetujuan dasar, untuk melaksanakan fungsi-

fungsi yang memberi manfaat timbal balik yang diejawantahkan melalui pertemuan-pertemuan serta kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan secara berkala”.

United Nations Human Rights Council (UNHRC) merupakan salah satu organisasi internasional yang dibawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). *UNHRC* mengupayakan untuk memajukan dan melindungi hak-hak asasi manusia di seluruh penjuru dunia dan untuk semua bangsa.

B. Teori Peran adalah sebuah sudut pandang dalam sosiologi dan psikologi sosial yang menganggap sebagian besar aktivitas harian diperankan oleh kategori-kategori yang ditetapkan secara sosial. Peranan menurut K.J Holsti yang diterjemahkan Wawan Juanda dalam bukunya “Politik Internasional Suatu Kerangka Analisis” yaitu:

“konsep peranan bisa dianggap sebagai definisi yang dikemukakan oleh para pengambil keputusan terhadap bentuk-bentuk umum, keputusan, aturan, dan fungsi negara dalam suatu atau beberapa masalah internasional. Peranan juga merefleksikan kecenderungan pokok, kekhawatiran, serta sikap terhadap lingkungan eksternal dan variable sistematik geografi dan ekonomi” (1992:159). Struktur, fungsi dan versi badan teori peranan lebih kepada peran sebagai perilaku yang mengikuti bagian kepastian atau posisi daripada pemain yang hanya membaca atau menceritakannya.¹¹

⁸ http://m.kompasiana.com/habibmansyur12/keamanan-manusia-human-security-dan-perdagangan-manusia-human-trafficking_56e3b2c8707e611a117ceef0, diakses pada 11 oktober 2016 pukul. 23.38 WIB.

⁹ Archer, Clive. 1983. *International Organization*. London: University of Aberdeen, hlm. 35

¹⁰ Drs. T. May Rudy, SH., MIR., M.Sc.: editor Aep Gunarsa, SH. *Administrasi dan Organisasi Internasional*. Bandung: Refika Aditama. 1993. Hlm.2

¹¹ Cameron G. Thies, *Role the Theory and Foreign Policy*. University of Iowa, 2009. Diakses dari <http://myweb.uiowa.edu/bhlai/workshop/role.pdf>. Pada 15 oktober 2016 pukul 22.48 WIB

Peranan dapat diartikan sebagai orientasi atau konsepsi dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam posisi sosialnya. Dengan peranan tersebut sang pelaku peran baik itu individu maupun organisasi akan berperilaku sesuai dengan harapan orang atau lingkungannya.

Teori peran setidaknya mencakup tiga hal, yaitu meliputi peran structural, fungsional dan relasional.¹² *United Nations Human Rights Council* disini mengemban peran fungsional, dimana peran fungsional suatu struktur kelembagaan dalam masyarakat pada dasarnya memiliki fungsi-fungsi.

United Nations Human Rights Council berperan sebagai organisasi internasional yang memiliki fungsi sebagai pengambil kebijakan, melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran HAM untuk menjalankan fungsinya secara baik.

II. Isi

Gambaran Umum Republik Afrika Tengah

Republik Afrika Tengah merupakan sebuah negara yang terletak di pedalaman Afrika yang berbatasan dengan Chad di utara, Sudan di timur laut, Sudan Selatan di timur, Republik Demokratik Kongo dan Republik Kongo di selatan, dan Kamreun di barat. Pada akhir abad ke-19 Republik Afrika Tengah dijajah oleh Perancis dan pada tahun 1960 Republik Afrika Tengah merdeka dari Perancis. Negara ini terkurung oleh daratan, tidak mempunyai lautan, dan letaknya berada ditengah Benua Afrika.

Negara dengan ibukota Bangui ini berada di pedalaman Afrika, memiliki luas

sekitar 622.984 km² dan populasi sekitar 5 juta orang. Sebagaimana negara di Afrika lainnya, Republik Afrika Tengah terdiri dari beberapa etnis, diantaranya Baya 33%, Banda 27%, Mandjia 13%, Sara 10%, Mboum 7%, M'baka 4%, Yakoma 4%, dan lainnya 2%. Untuk agama, 35% merupakan penganut keyakinan Adat, Protestan 25%, Katolik Roma 25%, dan Muslim 15%. Kekayaan alam yang dihasilkan seperti uranium, kayu, emas, berlian, dan pembangkit listrik tenaga air.¹³

Republik Afrika Tengah termasuk salah satu negara termiskin didunia, terlebih lagi serangkaian kudeta dan kekerasan politik sering terjadi di Republik Afrika Tengah sejak memperoleh kemerdekaan dari Perancis. Ketidakstabilan politik dan kondisi ekonomi ini disebabkan oleh peran pemerintah yang tidak optimal.

Sebelumnya nama Republik Afrika Tengah adalah Ubangi-Shari yang dipersatukan dengan negara Chad pada tahun 1905 dan pada tahun 1910 bergabung dengan Gabon dan Kongo sehingga menjadi *French Equatorial Africa*.¹⁴ Negara ini tidak memiliki perairan. Negara bekas jajahan Perancis ini memiliki luas 623.000 km² dan dihuni oleh sekitar 5 juta jiwa, menurut data statistik pada 2011.¹⁵ Setelah berakhirnya Perang Dunia II banyak terjadi pemberontakan pada tahun 1946.

Perancis memberikan pemerintahan sendiri. Pemimpin Pertama adalah seorang mantan pendeta Khatolik Roma, Bartheleny Boganda, yang di pilih ke Majelis Nasional Perancis. Boganda menjadi Presiden tidak

¹² Skripsi "Peran Politik Umat Islam Di Perancis Pada Masa Presiden Nicolas Sarkozy (2007-2012) oleh Imam Marzuki, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, hlm.12

¹³ <http://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ct.html>

¹⁴ Amy McKenna. 2011. *The History of Central and Eastern Africa*. New York: Brittanica Educational Publishing, hlm 10.

¹⁵ Central African Republic, contry profile http://www.nationsonline.org/oneworld/central_africa_n_republic.htm

terlalu lama karena pada akhirnya dia meninggal sebelum kemerdekaan penuh dicapai Republik Afrika Tengah. Pada tanggal 12 Juli 1960 Perancis setuju Republik Afrika Tengah menjadi sepenuhnya independen.¹⁶ Boganda pun digantikan oleh sepupunya David Dacko menduduki posisi sebagai kepala pemerintahan saat itu. Pada tanggal 13 Agustus 1960 David Dacko memproklamasikan kemerdekaan Republik Afrika Tengah dari Perancis sekaligus menjadi Presiden Pertama di Republik Afrika Tengah.

Keadaan Wilayah dan Penduduk

Republik Afrika Tengah sedikit lebih kecil dari negara bagian Texas Amerika Serikat, terletak di jantung Afrika (tak berpantai). Negara ini memiliki luas wilayah 623.000 km² dan dihuni oleh sekitar 5 juta jiwa, menurut data statistik pada tahun 2011. Iklim di wilayah ini cukup unik, yaitu tropis, panas, dingin kering, hangat dan bermusim panas tetapi basah.

Negara ini tidak terhubung langsung dengan laut. Tanpa akses langsung ke laut, tidak adanya kereta api, dan hanya sekitar 600 km dari jalan beraspal menyebabkan transportasi dan perdagangan sangat sulit.¹⁷ Bandara Internasional hanya berada di ibukota Bangui, ada beberapa bandara dan landasan terbang lainnya tetapi penerbangan tidak dapat dilakukan karena pasokan bahan bakar dan layanan internal yang tidak teratur.

Keadaan penduduk di Republik Afrika Tengah 70% diantaranya hidup di daerah terpencil dan mereka hidup sebagai

petani. Walaupun negara ini termasuk salah satu negara termiskin didunia, pertanian tetap menjadi andalan terbesar dan memberikan separuh dari devisa negara disamping kayu dan berlian. Pada Januari tahun lalu, negara yang selalu dilanda konflik yang tidak berujung ini terancam kehilangan setengah populasi negaranya.

Dikarenakan wabah kelaparan yang melanda negara ini. Sebanyak 2,5 juta warga negara tersebut atau setengah dari jumlah keseluruhan menderita kelaparan, laporan tersebut disampaikan oleh PBB.¹⁸ Kelaparan terjadi karna masyarakat di Republik Afrika Tengah merasa takut untuk bertani dan beternak karena konflik yang sering kali terjadi. Keadaan diperparah dengan hasil panen yang buruk dalam beberapa tahun terakhir.

Ekonomi

Republik Afrika Tengah kaya akan sumber daya alam dan mineral. Dikarenakan lemahnya infrastruktur dan letak geografisnya yang terkurung daratan menghambat pemasukan untuk negara. Konflik yang terjadi juga menghambat semua potensi untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang melimpah. Sebagian besar penduduk bekerja sebagai petani. Fasilitas kesehatan yang terbatas dan adanya kesenjangan antara ibukota kaya dan wilayah pedalaman yang miskin.

Pasca merdeka tahun 1960, bangsa ini tidak sepenuhnya memanfaatkan kemerdekaan. Dibuktikan dengan banyaknya kudeta yang terjadi sepanjang tahun setelah kemerdekaan, pemberontakan-pemberontakan dan keadaan negara yang tidak stabil. Pemerintahan tidak optimal

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Tamara Lynn Giles-Vernick. 2011. *C.A.R; Central African Empire; Republique Centrafricaine*. <http://www.britannica.com/EBchecked/topic/102152/Central-African-Republic/40691/finance-and-trade>. Diakses pada tanggal 02 maret 2017

¹⁸ “Setengah Populasi Republik Afrika Tengah Terancam Mati Kelaparan” <http://m.liputan6.com/global/read/2417209/setengah-populasi-republik-afrika-tengah-terancam-mati-kelaparan-> diakses pada tanggal 10 maret 2017

dengan banyaknya masalah internal seperti paham kesukuan, nepotisme dan korupsi. Letak geografis Republik Afrika Tengah bukan negara yang minim akan sumber daya alam. Republik Afrika Tengah mempunyai sumber daya alam bernilai tinggi, seperti uranium, emas, dan berlian yang menjadi potensi ekspor utama di negara ini. Lemahnya campur tangan pemerintah dalam mengelola dan mengawasi sumber daya alam mengakibatkan rakyat belum sejahtera sehingga muncul ketimpangan dan diskriminasi wilayah dalam pembangunan.¹⁹ Adanya diskriminasi ekonomi ini menjadi penghambat kemajuan ekonomi dan kesejahteraan di negara ini.

Politik

Pasca berakhirnya rezim sepuluh tahun Presiden Francois Bozize sama seperti Presiden sebelumnya, kudeta oleh kelompok pemberontak yaitu Seleka. Serangan terhadap kota Sibut dan Damara pada September 2012 merupakan awal kesulitan pemerintah, memutuskan untuk tidak bernegosiasi dan memilih opsi militer, serta berlanjutnya pemberontakan yang dilakukan Seleka.²⁰ Perubahan dalam pemerintahan telah terjadi dengan tiga metode yaitu kekerasan/kudeta, negosiasi, dan pemilihan.

Militer yang berperan sangat penting di negara ini telah berlangsung sejak kemerdekaan 1960. Ketidakstabilan yang terjadi di Republik Afrika Tengah telah terjadi dalam waktu yang lama. Kelompok-kelompok yang menentang pemerintahan bukan hal yang baru begitu juga kudeta-kudeta yang terjadi sepanjang tahun sejak

kemerdekaan. Sejak merdeka dari Perancis Republik Afrika Tengah terus dilanda kemiskinan, bergantinya Presiden tidak mengubah keadaan negara ini.

Tahun 2014 Republik Afrika Tengah masuk kedalam negara paling korup di dunia, pada peringkat 150 dari 175 negara.²¹ Adanya ketidakpercayaan terhadap pemimpin membuat terjadinya kudeta dan negara ini dianggap gagal dalam mengatasi keluhan dan kebutuhan masyarakatnya. Negara ini gagal dalam mensejahterakan rakyat karena para pemimpin negara terpilih lebih memperkaya diri sendiri daripada mencukupi kebutuhan rakyat dan kecemasan pemimpinnya takut dikudeta juga menjadi penyebabnya negara ini dibawah garis kemiskinan.

Keterlibatan UNHRC di Republik Afrika Tengah

Pada awalnya konflik yang terjadi di Republik Afrika Tengah dimulai sejak Desember 2012 - Januari 2013 antara Pemerintahan Republik Afrika Tengah dan Pemberontak. Pihak pemberontak yang dikenal Koalisi Seleka ini menuduh Presiden Francois Bozize gagal dalam mematuhi perjanjian damai. Hal ini menjadi pemicu pihak Oposisi Seleka yang sebagian besar didominasi oleh Muslim untuk melakukan pemberontakan. Mereka berhasil menduduki berbagai kota besar di kawasan tengah dan timur Republik Afrika Tengah.

Sejak konflik yang terjadi di Republik Afrika Tengah mencapai titik kulminasi pada tahun 2012 dan semakin sulitnya dikendalikan PBB dan Uni Afrika melakukan intervensi dengan membentuk

¹⁹ Soekma Hermawati, Titin. 2016. *Intervensi Kemanusiaan PBB Dalam Menangani Pelanggaran HAM DI Republik Afrika Tengah Pada Tahun 2013-2014*. eJournal Ilmu Hubungan Internasional, Volume 4, Nomor 1, 2016:211-220 hlm. 216

²⁰ Ibid hlm. 217

²¹ Transparency.org. Corruption By Country. Diakses dari <http://www.transparency.org/country/#CAF>. Pada tanggal 10 maret 2017

badan khusus dalam menangani konflik yaitu MISCA. Sebelumnya PBB tidak terlibat langsung dan hanya melakukan pemantauan karena Republik Afrika Tengah menyerahkan permasalahan konflik kepada Uni Afrika.

Pada Kamis malam (5 Desember 2013) menurut WIB, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) telah sepakat mengesahkan Resolusi nomor 2127, mengizinkan melancarkan pasukan militer Perancis dan Afrika guna mencegah kekerasan berdarah-darah yang berkecenderungan meningkat di Republik Afrika Tengah.²² Resolusi ini mengizinkan melaksanakan Misi Bantuan Internasional pimpinan Afrika atau MISCA dengan bantuan dari Perancis untuk membela warga sipil dan menstabilkan kondisi negara Republik Afrika Tengah.

Dewan Keamanan yang beranggotakan 15 negara anggota secara bulat menyetujui, Pada bulan April 2014, pembentukan dari Misi Stabilisasi Multidimensional Terpadu PBB (MINUSCA) yang diharapkan berada di lapangan pada bulan September.²³ Dengan adanya misi PBB ini dapat membantu menstabilkan kondisi di wilayah konflik Republik Afrika Tengah.

Misi PBB yang baru adalah untuk mengambil alih tanggung jawab dari Misi Dukungan Internasional yang dipimpin oleh Afrika, yang dikenal sebagai MISCA, dan awalnya akan terdiri dari hingga 10.000 personel militer, termasuk 240 pengamat militer dan 200 perwira staf, serta 1.800

personel polisi, PBB juga menugaskan kembali beberapa pasukan MISCA untuk bergabung dengan pasukan MINUSCA.²⁴ Pasukan ini mengambil alih karena sebelumnya negara ini tidak mampu mengatasi konflik yang terus berlangsung yang memakan banyak korban jiwa terutama warga sipil yang tidak bersalah.

Pasukan Perdamaian yang dikirimkan di wilayah konflik Republik Afrika Tengah dilaporkan oleh kelompok aktivis Dunia Bebas-AIDS mengatakan 15 tentara asal Perancis dituduh melakukan kekerasan seksual pada anak dibawah umur pada saat bertugas di wilayah konflik terjadi. Pelanggaran seks itu kabarnya terjadi di pusat pengungsi dekat bandara di ibukota, Bangui antara Desember 2013 dan Juni 2014.²⁵ Kasus ini terungkap pada saat kelompok ini mengeluarkan pernyataan yang didapat dari UNICEF yang telah mewawancarai anak perempuan yang menjadi korban pelecehan seksual oleh pasukan perdamaian internasional.

Salah satu mandat pusat misi penjaga perdamaian PBB di Republik Afrika Tengah adalah perlindungan warga sipil, perempuan dan anak-anak korban konflik bersenjata tertentu. Dalam kasus dugaan ini, PBB dan mitra lokalnya gagal memenuhi kewajiban. Pasukan penjaga perdamaian mengeksploitasi kerentanan orang yang seharusnya dilindungi adalah pengkhianatan dasar kepercayaan. Ketika masyarakat internasional gagal untuk merawat para korban atau untuk menahan pelaku merupakan pengkhianatan yang diperparah.

Penanganan kasus pelecehan seksual yang terjadi di Republik Afrika Tengah ditangani langsung oleh Dewan HAM PBB

²² Diakses pada <http://vovworld.vn/id-id/Berita/DK-PBB-mendukung-intervensi--militer-terhadap-Republik-Afrika-Tengah/200331.vov> tanggal 24 April 2017

²³ Ananda, Rizky. 2015. Penanganan Konflik di Republik Afrika Tengah Oleh PBB Pada Tahun 2013. Jom Fisip. Vol.2 No.1. hlm. 9

²⁴ Ibid.

²⁵ Diakses pada <http://voaindonesia.com/a/perancis-selidiki-kekerasan-seksual-di-afrika-oleh-tentaranya/2742756.html> tanggal 25 April 2017

dengan bantuan dan kerjasama dari negara anggota yang terlibat didalamnya. Intervensi Kemanusiaan sebagai intervensi yang melintasi batas negara oleh negara atau kelompok negara dengan penggunaan kekuatan yang bertujuan untuk mencegah atau mengakhiri pelanggaran hak asasi manusia dari suatu negara terhadap warganya sendiri, walaupun tindakan tersebut melanggar kedaulatan negara tersebut.

Keterlibatan langsung Dewan HAM PBB dalam kasus ini karena pelaku yang terlibat didalamnya merupakan bagian dari PBB. Intervensi Kemanusiaan PBB dalam menangani pelanggaran HAM di Republik Afrika Tengah yang ditugaskan kepada pasukan penjaga perdamaian multidimensional PBB melakukan tindakan yang melanggar HAM, PBB sebagai badan tertinggi yang masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat internasional berusaha untuk menegakkan kembali HAM dan mengangkat kembali harkat martabat manusia.

Secara khusus, PBB harus mengakui bahwa kekerasan seksual oleh pasukan penjaga perdamaian memicu mandat hak asasi manusia untuk melindungi korban, menyelidiki, laporan, menindaklanjuti pelanggaran hak asasi manusia dan mengambil langkah tepat untuk menahan pelaku. Tidak adanya tindakan nyata untuk mengatasi kesalahan oleh orang-orang yang dikirim untuk melindungi warga sipil yang rentan dari PBB itu sendiri, kredibilitas PBB dan masa depan operasi penjaga perdamaian berada dalam bahaya.

Misi dari pasukan penjaga perdamaian PBB bersifat multidimensional yang dimana tugas dan fungsinya bukan hanya saja melakukan penjagaan dan memonitor proses perdamaian di daerah misi, namun pasukan penjaga perdamaian PBB juga ikut serta dalam proses

perdamaian, dan hal itu harus dijalankan sesuai dengan ketentuan Hukum Internasional seperti Piagam PBB, Hukum HAM Internasional, Hukum Humaniter Internasional, dan Mandat Dewan Keamanan PBB.²⁶

Dalam konteks negara yang mengalami konflik ekstrim, tujuan utama dan paling penting dari operasi penjaga perdamaian secara resmi atau mandat dari Dewan Keamanan, adalah untuk melindungi penduduk sipil. Pasukan penjaga perdamaian mengeksploitasi kerentanan orang yang mereka telah dikirim untuk melindungi dengan menyalahgunakan kekuasaan adalah pengkhianatan dasar kepercayaan. Kesalahan yang dilakukan oleh pasukan ini telah membuat dampak buruk bagi PBB dan hilangnya kepercayaan dunia terhadap pasukan penjaga perdamaian PBB.

Tuduhan Terhadap Pasukan Penjaga Perdamaian

Pada awalnya terdapat dugaan terhadap pasukan perdamaian Sangaris Perancis melakukan tindakan pelecehan seksual terhadap warga sipil yaitu anak-anak. Pada saat misi pasukan penjaga perdamaian Perancis dan MISCA diambil alih oleh pasukan PBB MINUSCA tuduhan muncul terhadap staf PBB bahwa pasukan PBB MINUSCA juga melakukan hal serupa terhadap anak-anak disana.

Insiden pelecehan seksual terhadap anak-anak di Republik Afrika Tengah terjadi antara bulan Desember 2013 dan pada bulan Juni 2014. Pertama kali diketahui, kejadian ini diketahui pada saat staf UNICEF lokal bersama staf kantor hak asasi manusia (HRO) yang bekerja untuk misi PBB di

²⁶ I Putu Dwika dkk. *Analisis Hukum Internasional Mengenai Pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Pasukan Penjaga Perdamaian PBB*. Universitas Udayana

Republik Afrika Tengah yang berada disana melakukan wawancara terhadap beberapa anak di wilayah tersebut.

Pada musim semi 2014 terungkap bahwa pasukan internasional yang bertugas di misi penjaga perdamaian di Republik Afrika Tengah dilaporkan telah melakukan pelecehan seksual terhadap sejumlah anak-anak dalam pertukaran untuk makanan atau uang. Pelaku diduga sebagian besar berasal dari kekuatan militer Perancis yang dikenal sebagai Angkatan Sangaris yang beroperasi sebagai pasukan penjaga perdamaian dibawah otorisasi Dewan Keamanan tetapi tidak di bawah komando PBB.

Pasukan non-PBB dari Prancis, Equatorial Guinea dan Chad yang mewakili Uni Afrika diduga melakukan pelecehan seksual terhadap anak laki-laki di kamp M'Poko untuk pengungsi internal (IDP) di Bangui pada Desember 2013 hingga Juni 2014.²⁷ Sebagai gantinya anak-anak menerima sejumlah kecil makanan atau uang tunai dari para prajurit. Dalam beberapa kasus anak-anak melaporkan informasi rinci tentang pelaku, termasuk nama-nama dan ciri khas tertentu seperti tato, tindik dan fitur wajah. Dugaan pertama kali masuk ketika kepala sebuah LSM lokal yang bekerja di M'Poko Camp menemukan bahwa anak-anak pengungsi dilecehkan dengan imbalan makanan atau uang. Pada saat tuduhan dilaporkan bulan Mei 2014 kepada Hak Asasi Manusia dan Seksi Keadilan (HRJS) dari MINUSCA ke kantor UNICEF di Bangui, dengan cepat memulai penyelidikan terhadap dugaan.

Pada tanggal 19 Mei dan 24 Juni 2014, *Human Rights Officer* (HRO) dan HRJS melakukan wawancara bersama-sama dengan Petugas Keamanan UNICEF, enam

²⁷ Laporan Negara Tentang Praktek HAM 2015. Departemen Luar Negeri AS, Biro Demokrasi HAM dan Tenaga kerja.

anak melaporkan pelecehan seksual oleh Angkatan Sangaris dan Pasukan TCC lainnya.

Pelanggaran yang dilaporkan oleh anak-anak yang diwawancarai oleh HRO dan LSM lokal bersifat sangat serius dan termasuk dalam definisi kekerasan seksual konflik terkait yang dikembangkan di PBB.²⁸ Pemerksosaan dan bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak-anak dalam konflik bersenjata juga merupakan salah satu dari enam pelanggaran berat yang dijelaskan dibawah Monitoring dan Pelaporan Mekanisme Pelanggaran Grave terhadap Anak dalam Situasi Konflik Bersenjata, Juni 2014 (Pedoman MRM).²⁹

Pengadaan seks dari anak-anak dengan imbalan makanan atau uang dapat merupakan pelanggaran berat hak asasi manusia internasional, hukum humaniter internasional, dan hukum pidana internasional.³⁰ Jumlah kasus yang dilaporkan naik dari 52 pada 2014 menjadi 69 pada 2015 dan sebagian besar kasus berada di CAR.³¹ Laporan yang dipublikasikan pada bulan Desember 2015 menemukan bahwa PBB, UNICEF, dan lain-lain telah banyak gagal dalam menjalankan tugas untuk menempatkan hak asasi manusia sebagai hak dasar dan melindungi kepentingan anak-anak.

Para pejabat PBB melaporkan 22 dugaan pelecehan seksual atau eksploitasi

²⁸ Laporan Sekretaris Jenderal. Konflik Terkait Kekerasan Seksual. A / 66/657-S / 2012/33. 13 Jan 2012, p.3.

²⁹ Pedoman Pemantauan dan Pelaporan Mekanisme Pelanggaran Grave terhadap Anak dalam Situasi Konflik Bersenjata. Juni 2014 (Pedoman MRM). p.7.

³⁰ Statuta Roma tentang Mahkamah Pidana Internasional, seni. 7 (1) (c), 7 (1) (g), 8 (2) (a) (ii) dan (iii), 8 (2) (b) (xxii), 8 (2) (c) (i), 8 (2) (e) (vi).

³¹ Sexual Violence By Peacekeepers Against Children And Other Civilians – A *Practical Guide For Advocacy*. Lihat (www.crin.org)

oleh personel MINUSCA di Republik Afrika Tengah pada tahun 2015, sembilan di antaranya terlibat anak di bawah umur.³² Mengenai 22 tuduhan yang tercatat di MINUSCA pada tahun 2015, tujuh penyelidikan telah menyimpulkan bahwa tiga tuduhan yang dibuktikan (2 militer, 1 polisi) dan empat berdasar (militer), 14 investigasi yang tertunda selesai, Satu hal ditandai "untuk informasi", menunjukkan bahwa tidak ada informasi yang cukup untuk melakukan penyelidikan.³³

Baru-baru ini, "Code Blue Campaign" mengungkapkan³⁴ bahwa dalam satu provinsi di Republik Afrika Tengah saja, 98 anak perempuan yang ditemui mengaku telah mengalami pelecehan seksual oleh pasukan penjaga perdamaian PBB. Kasus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Menurut laporan Sekretaris Jenderal pada bulan Februari 2016 jumlah tuduhan baru mencapai 99 pada tahun 2015, dan tercatat 22 tuduhan terhadap MINUSCA.

Jumlah tuduhan yang tercatat sejauh ini di semua misi penjaga perdamaian dan misi politik khusus pada tahun 2016 adalah 44 tuduhan. Dari jumlah tersebut, 29 telah dilaporkan di MINUSCA.³⁵ Sepanjang tahun 2016 kasus yang terjadi kebanyakan telah dilaporkan di Republik Afrika Tengah. Berdasarkan update informasi dari conduct discipline milik UN pada bulan Maret 2017, Pada tahun 2016, terdapat 103 tuduhan eksploitasi seksual dan penyalahgunaan dilaporkan dalam bidang misi PBB. 47%

³² Laporan Negara Tentang Praktek HAM 2015. Departemen Luar Negeri AS, Biro Demokrasi HAM dan Tenaga kerja.

³³ Update tuduhan dan Eksploitasi Seksual dan Penyalahgunaan di Operasi Penjaga Perdamaian PBB dan Misi Politik Khusus 17 Mei 2016. Diakses pada <https://cdu.unlb.org>

³⁴ Code Blue Campaign Siaran Pers, 30 Maret 2016

³⁵ Update tuduhan dan Eksploitasi Seksual dan Penyalahgunaan di Operasi Penjaga Perdamaian PBB dan Misi Politik Khusus 17 Mei 2016. Diakses pada <https://cdu.unlb.org>

terkait dengan insiden yang terjadi sebelum 2016. Dari 103 tuduhan tersebut, 50% (52 tuduhan dan 65% terjadi sebelum 2016) kasus tuduhan berada di MINUSCA.

Langkah-langkah Khusus Terkait Kasus Pelecehan Seksual

Penyelenggaraan External Independent Review Panel

Pada tanggal 22 Juni 2015 Sekretaris Jenderal PBB membentuk sebuah panel independen untuk meninjau respon dari PBB terkait tuduhan yang diajukan, dan hasil dari eksternal independen review panel ini yang akan menginformasikan bagaimana upaya dan langkah yang akan diambil oleh PBB. Panel menggambarkan respon sebagai terfragmentasi, birokrasi, dan gagal memenuhi mandat inti organisasi untuk menangani pelanggaran hak asasi manusia. Panel kemudian membuat 12 rekomendasi yang akan mengatasi kelemahan yang telah diidentifikasi untuk meningkatkan respon PBB saat terjadinya dugaan pelecehan seksual. Berdasarkan alasan tersebut, Sekretaris Jenderal mempertimbangkan temuan dari panel dengan menyerukan kepada seluruh sistem PBB untuk melipatgandakan upayanya untuk mencegah eksploitasi dan pelecehan seksual ketika kasus terjadi.

Pembentukan Unit Koordinasi di Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR)

Berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh panel, dibentuknya unit koordinasi khusus dengan pengawasan dan kemampuan pemantauan, didukung oleh kelompok kerja dengan keahlian bidang HAM dan kekerasan seksual. Fungsi dari unit akan mencakup pemantauan, pelaporan, menindaklanjuti tuduhan pelecehan seksual, menganalisis data dengan maksud untuk tren pelacakan dan praktek untuk tujuan

meningkatkan pencegahan, akuntabilitas dan menindaklanjuti pelaksanaan rekomendasi Panel.³⁶ Dalam unit koordinasi ini, Sekretaris Jenderal menunjuk koordinator khusus untuk membangun pekerjaan pekerjaan yang sedang berlangsung dan berkonsultasi secara luas dengan negara-negara anggota, stakholder internal, organisasi regional dan ahli luar.³⁷

Pembentukan Kelompok Kerja

Sekretaris Jenderal berupaya menerapkan prinsip-prinsip yang mendasari rekomendasi untuk semua personil PBB, termasuk personil berseragam dan sipil, kontraktor, UN Volunteers dan ahli misi.³⁸ Upaya-upaya yang dilakukan ini untuk memastikan kedepannya kejadian seperti ini tidak akan terulang kembali dan jika terulang kembali tindakan yang tepat akan dilakukan untuk ditindaklanjuti. Dalam laporan yang diterima dari panel, Sekretaris Jenderal membentuk sebuah kelompok kerja tingkat tinggi dibawah kepemimpinan chef de kabinet yang terdiri dari kepala kantor, departemen, program dan dana yang terlibat dalam merespon isu-isu pelecehan seksual dan kekerasan berbasis gender.

Kelompok pengarah ini bertemu secara teratur setiap dua minggu untuk memastikan bahwa tim manajemen senior secara langsung terlibat dalam penguatan respon. Kelompok kerja harus mengembangkan kebijakan tunggal harmonisasi kebijakan SEA dan HAM dan mengembangkan proses mempromosikan pertanggungjawaban pidana kekerasan seksual. Kelompok kerja ini melakukan analisis yang komprehensif dari rekomendasi panel, jika memungkinkan segera memulai pelaksanaannya

Penunjukan Koordinator Khusus

Pada bulan Februari 2016, Sekretaris Jenderal menunjuk Koordinator Khusus untuk meningkatkan respon PBB untuk eksploitasi seksual dan pelecehan. Peran Koordinator Khusus adalah untuk memastikan koherensi dan harmonisasi. Koordinator khusus ini yang akan memimpin kelompok kerja. Penunjukan Koordinator Khusus ini disambut baik dengan adanya Resolusi Majelis Umum 70/286 (2016) dan Resolusi Dewan Keamanan 2272 (2016). Pada bulan Maret 2016 Koordinator Khusus memimpin kelompok kerja.

Koordinator Khusus akan mendukung Sekretaris Jenderal dalam memastikan review yang efektif dan tepat waktu dan pelaksanaan rekomendasi Panel dan langkah-langkah lain yang dianggap perlu untuk memperkuat respon PBB.³⁹ Kompleksitas rekomendasi Panel ini dan implikasinya yang luas terhadap PBB, negara anggota, pasukan-berkontribusi, dan polisi-kontribusi negara akan memerlukan konsultasi dengan negara-negara atau persetujuan oleh negara anggota.

Melakukan Negosiasi dengan Negara-negara Pasukan Kontribusi

Salah satu upaya yang dilakukan agar memastikan penuntutan terhadap pasukan perdamaian yang melakukan pelecehan seksual dinegara misi tempat mereka ditugaskan adalah dengan melakukan negosiasi atau bekerjasama dengan negara pasukan kontribusi untuk memperoleh keadilan bagi korban dan untuk memastikan akuntabilitas penuh pelaku. Hal ini dikarenakan kewenangan untuk memberikan sanksi atau pidana untuk mengadili pasukan perdamaian berada dibawah yurisdiksi eksklusif negara anggota.

Akuntabilitas pidana pasukan non-PBB tergantung pada pengaturan di tempat disetiap contoh, seperti pengaturan bilateral antara negara kontribusi dan negara tuan

³⁶ Laporan Sekretaris Jenderal kepada Majelis Umum. "Memerangi Eksploitasi Seksual dan Penyalahgunaan". A/71/97 . Juni 2016

³⁷ Ibid.

³⁸ Ibid.

³⁹ Ibid.

rumah.⁴⁰ Dalam sebagian besar kasus, negara asal mempertahankan yurisdiksi eksklusifnya.

Sejak bulan Maret 2016, Departemen Operasi Penjaga Perdamaian dan Departemen Dukungan Lapangan bersama-sama dengan Koordinator Khusus telah secara luas terlibat dengan negara anggota, termasuk pasukan dan polisi-kontribusi negara untuk menjamin keadilan dan akuntabilitas.⁴¹ Per Juni 2016, empat pertemuan telah diadakan untuk mencari pandangan dari negara anggota tentang kemungkinan mengadakan pengadilan oleh otoritas nasional mereka atas kejahatan yang dilakukan di negara tuan rumah.

Pelaksanaan Resolusi Dewan Keamanan PBB 2272 (2016) dan Resolusi Majelis Umum 70/286 (2016)

Pada bulan Maret 2016, Dewan Keamanan mengadopsi resolusi 2272 (2016). Dimana ia menyoroti pandangannya bahwa memerangi eksploitasi seksual dan penyalahgunaan diperlukan kemitraan yang kuat antara Organisasi dan negara anggota.⁴² Dewan eksplisit mendukung penuh tindakan dan menegaskan kembali dukungannya untuk menerapkan kebijakan PBB nol toleransi terhadap eksploitasi seksual dan penyalahgunaan. Pada tanggal 17 Juni 2016 Majelis Umum mengadopsi resolusi 70/286, menyambut penentuan Sekretaris Jenderal untuk sepenuhnya melaksanakan kebijakan PBB nol toleransi eksploitasi seksual dan penyalahgunaan, menegaskan kembali bahwa semua warga sipil, militer dan polisi diberlakukan standar perilaku yang sama untuk melestarikan citra, kredibilitas, menanamkan impartiality dan integritas PBB.⁴³ Resolusi-resolusi yang telah diadopsi

⁴⁰ Ibid.

⁴¹ Ibid.

⁴² Laporan Sekretaris Jenderal kepada Majelis Umum. "Memerangi Eksploitasi Seksual dan Penyalahgunaan". A/71/97 . Juni 2016 hlm. 4

⁴³ Ibid.

ini kedepannya akan segera dilaksanakan sesuai isi yang tercantum didalam resolusi-resolusi ini.

Pelaksanaan resolusi ini terbilang cepat diimplementasikan. Sebagai contoh akuntabilitas cepat muncul. Pada bulan Maret 2016, 20 tentara dari Republik Demokratik Kongo yang pernah bertugas di *United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in the Central African Republic* (MINUSCA) ditangkap setelah pemulangan mereka terkait beberapa tuduhan termasuk pemerkosaan dan berbagai pelanggaran kriminal lainnya.⁴⁴ Beberapa kasus serupa terkait eksploitasi seksual dan penyalahgunaan di berbagai negara konflik yang melibatkan pasukan penjaga perdamaian telah ditindaklanjuti seperti melakukan penyelidikan cepat tanggap saat kasus terjadi. Resolusi Dewan Keamanan PBB 2272 (2016) menyatakan agar negara-negara anggota untuk memperkuat pencegahan melalui pelatihan, pelaksanaan, monitoring dan memperluas pemeriksaan.

Resolusi Majelis Umum 70/286 (2016) meminta agar laporan tahunan masa depan langkah-langkah khusus termasuk informasi yang berkaitan dengan tuduhan eksploitasi seksual dan penyalahgunaan oleh pasukan non-PBB yang beroperasi dibawah mandat Dewan Keamanan dilaporkan kepada Majelis Umum.

Simpulan

Simpulan dari penelitian ini adalah Pelanggaran HAM berat seperti tindakan eksploitasi seksual dan penyalahgunaan yang dilakukan oleh pasukan penjaga perdamaian dibawah komando PBB harus segera ditindaklanjuti dengan menjatuhkan hukuman penjara kepada pelaku kejahatan.

⁴⁴ Laporan Sekretaris Jenderal kepada Majelis Umum. "Memerangi Eksploitasi Seksual dan Penyalahgunaan". A/71/97 . Juni 2016 hlm. 5

Semua pihak yang terlibat diharuskan menegakkan keadilan untuk menghukum pelaku dan apabila pelaku telah dipulangkan kenegaranya, pihak negara pasukan kontribusi negara atau TCCs harus bertindak tegas dalam kasus ini. Dengan adanya Resolusi Dewan Keamanan PBB 2272 dan Resolusi Majelis Umum 70/286 dapat membantu dalam penyelesaian kasus pelecehan seksual yang terjadi baik yang telah terjadi maupun dimasa yang akan datang.

Pelecehan seksual ini tidak hanya memperlakukan nama PBB sebagai organisasi internasional yang sangat dipercayai dan merupakan harapan bagi masyarakat yang berada di tengah-tengah konflik negara untuk memperjuangkan hak mereka, tindakan pelecehan seksual yang dilakukan pasukan penjaga perdamaian PBB ini juga menghilangkan rasa kepercayaan masyarakat internasional terhadap PBB. Oleh karena itu peran dari Dewan HAM PBB atau *United Nations Human Rights Council* sangat diperlukan dalam mengatasi dan penyelesaian permasalahan seperti pelanggaran HAM berat.

Referensi

Buku, Jurnal, Dokumen/Laporan, Skripsi, Internet, dan Media Online

Jurnal

Ananda, Rizky. Penanganan Konflik di Republik Afrika Tengah Oleh PBB Pada Tahun 2013. *Jom Fisip*. Vol.2 No.1. hlm. 9. 2015

I Putu Dwika dk. Analisis Hukum Internasional Mengenai Pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Pasukan Penjaga Perdamaian PBB. Universitas Udayana

Saeri, M. Teori Hubungan Internasional Sebuah Pendekatan Paradigmatik.

Jurnal Transnasional Ilmu Hubungan Internasional. Vol. 03. No.02. 2012

Soekma Hermawati, Titin. Intervensi Kemanusiaan PBB Dalam Menangani Pelanggaran HAM Di Republik Afrika Tengah Pada Tahun 2013-2014. *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*. Vol. 04. No. 01. 2016

Buku

Amy McKenna. *The History of Central and Eastern Africa*. New York: Brittanica Educational Publishing. 2011.

Archer, Clive. *International Organization*. University of Aberdeen, London: 1983.

Rudy, SH., MIR., M.Sc, Drs. T. May. Editor Aep Gunarsa, SH. *Administrasi dan Organisasi Internasional*. Refika Aditama. Bandung. 1993

Sudarsono, Juwono. *Perkembangan Studi Hubungan Internasional dan Tantang Masa Depan*. Pustaka Jaya. Jakarta. 1996.

Skripsi

Skripsi "Peran Politik Umat Islam Di Perancis Pada Masa Presiden Nicolas Sarkozy (2007-2012) oleh Imam Marzuki. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Yogyakarta.

Dokumen/Laporan

Code Blue Campaign Siaran Pers, 30 Maret 2016

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Tahun 1948

Laporan Negara Tentang Praktek HAM 2015. Departemen Luar Negeri AS, Biro Demokrasi HAM dan Tenaga kerja.

Laporan Sekretaris Jenderal kepada Majelis Umum. "Memerangi Eksploitasi Seksual dan Penyalahgunaan". A/71/97 . Juni 2016

Laporan Sekretaris Jenderal. Konflik Terkait Kekerasan Seksual. A / 66/657-S / 2012/33. 13 Jan 2012, p.3.

Pedoman Pemantauan dan Pelaporan Mekanisme Pelanggaran Grave terhadap Anak dalam Situasi Konflik Bersenjata. Juni 2014 (Pedoman MRM). p.7.

Sexual Violence By Peacekeepers Against Children And Other Civilians – *A Practical Guide For Advocacy*. Lihat (www.crin.org)

Statuta Roma tentang Mahkamah Pidana Internasional, seni. 7 (1) (c), 7 (1) (g), 8 (2) (a) (ii) dan (iii), 8 (2) (b) (xxii), 8 (2) (c) (i), 8 (2) (e) (vi).

Internet

Cameron G. Thies, Role the Theory and Foreign Policy. University of Iowa, 2009.<http://myweb.uiowa.edu/bhlai/workshop/role.pdf>. diakses pada 15 oktober 2016

Eberhard, M.R, “*Crisis in the Central African Republic*”, International Condition for the Responsibility to Protect: daring, <http://www.responsibilitytoprotect.org/index.php/crises/crisis-in-the-central-african-republic#> diakses pada 15 oktober 2016

Transparency.org. Corruption By Country. <http://www.transparency.org/country/#CAF>. Diakses pada tanggal 10 maret 2017

Update tuduhan dan Eksploitasi Seksual dan Penyalahgunaan di Operasi Penjaga Perdamaian PBB dan Misi Politik Khusus 17 Mei 2016. Diakses pada <https://cdu.unlb.org>

Diakses pada <http://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ct.html>

Media Online

Diakses pada <http://m.cnnindonesia.com/internasional/20160304115457-134-115297/hampir-100-tuduhan-pelecehan-seks-terhadap-staf-pbb-pada-2015/>, tanggal 14 oktober 2016

Diakses pada

<http://liputanislam.com/berita/pbb-selidiki-kasus-baru-pelecehan-seks-pasukan-perdamaian-di-afrika-tengah/> tanggal 15 oktober 2016

Diakses pada

http://m.kompasiana.com/habibmansyur12/keamanan-manusia-human-security-dan-perdagangan-manusia-human-trafficking_56e3b2c8707e611a117ceef0, diakses pada 11 oktober 2016

Diakses pada Central African Republic, contry profile

http://www.nationsonline.org/oneworld/central_african_republic.htm

Tamara Lynn Giles-Vernick. 2011. *C.A.R; Central African Empire; Republique Centrafricaine*. <http://www.britannica.com/EBchecked/topic/102152/Central-African-Republic/40691/finance-and-trade>. Diakses pada tanggal 02 maret 2017

“Setengah Populasi Republik Afrika Tengah Terancam Mati Kelaparan” <http://m.liputan6.com/global/read/2417209/setengah-populasi-republik-afrika-tengah-terancam-mati-kelaparan-> diakses pada tanggal 10 maret 2017

Diakses pada <http://vovworld.vn/id-id/Berita/DK-PBB-mendukung-intervensi--militer-terhadap-Republik-Afrika-Tengah/200331.vov> tanggal 24 April 2017

Diakses pada

<http://voaindonesia.com/a/perancis-selidiki-kekerasan-seksual-di-afrika-oleh-tentaranya/2742756.html> tanggal 25 April 2017